



Relasi Antar Etnis dalam Ruang Multikultural di Pasar Gede Hardjonagoro Kota Surakarta

Faisal Amirul Muslimin¹ & Gunawan²

¹Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

²Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Corresponding Author:

Author Name*: Faisal Amirul Muslimin

Muslimin

Email*: faisalamirulm@gmail.com

Abstract: *Multiculturalism in Indonesia embodies a complex social framework rooted in colonial history, ethnic mobility, and cultural pluralism. Pasar Gede in Surakarta serves as a crucial site for interaction among various ethnic groups, particularly the Chinese and Javanese communities. These interactions, however, are often challenged by economic disparities and social tensions that can disrupt urban cohesion. Previous studies have primarily focused on multiculturalism through normative frameworks or governmental policies, overlooking the importance of local collective practices. This study aims to identify the factors contributing to cross-ethnic social harmony in Pasar Gede and to explore how social cohesion practices are passed down among diverse trading communities. Utilizing a descriptive qualitative methodology, the research examines spatial distribution, inter-ethnic accessibility, and the daily activities of market participants through field observations and interviews via snowball sampling. Findings reveal that Pasar Gede operates as a communal space managed collectively through informal negotiation and local norms. This study emphasizes that governance based on collective local experiences is more effective in promoting sustainable multiculturalism than top-down approaches. It contributes meaningfully to discussions on spatial studies, ethnic relations, and social cohesion in urban public settings.*

Keywords: *Multiculturalisme, Local Wisdom, Commoning, Urban Society.*

© 2025 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY-SA License)



Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan negara yang luas atas kekayaan budaya dan etnisitasnya. Dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah, multikulturalisme bukan sekedar gagasan abstrak, melainkan sebuah realitas yang ada dalam kenyataan sehari-hari pada kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, keberagaman ini tidak dapat secara sendirinya menciptakan harmoni sosial. Multikulturalisme sebagai konsep dalam kajian sosiologi hadir guna memahami dan mengelola pluralitas supaya tidak menjadi sebuah sumber konflik tetapi menjadi kekuatan kolektif dalam membangun masyarakat inklusif. Multikulturalisme merupakan sebuah respon terhadap meningkatnya arus migrasi global, dinamika sosial-politik akibat kolonialisme, dan tuntutan kelompok minoritas atas pengakuan serta hak-hak budaya dalam sistem negara-bangsa modern.

Multikulturalisme merupakan sebuah pendekatan sosial-politik yang mengakui serta menghargai adanya keberagaman budaya, etnis, agama, dan identitas dalam suatu masyarakat. Dalam perjalanan histori, istilah multikulturalisme banyak digunakan pada dekade 1960-1970-an khususnya di negara-negara Barat seperti Kanada dan Australia. Di Kanada, kebijakan multikulturalisme pertama kali diresmikan pada tahun 1971 sebagai bentuk dalam mengakomodasi komunitas pendatang yang berasal dari berbagai latar budaya (Grishaeva, 2012). Multikulturalisme mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan identitas dalam ruang sosial, yang kemudian oleh Will Kymlicka (2002) menyebutnya sebagai "politik pengakuan" atas kelompok minoritas yang seringkali terpinggirkan dalam sistem masyarakat homogen. Multikulturalisme menekankan pentingnya dialog lintas budaya, penghormatan terhadap nilai-nilai keberagaman dan pembentukan etika bersama yang inklusif serta menekankan bahwa budaya selalu dinamis dan saling mempengaruhi (Parekh, 2001). Multikulturalisme sering dihubungkan dengan politik identitas, politik perbedaan, dan politik pengakuan serta afirmasi (Lumowa, 2022). Dalam kerangka ini, multikulturalisme tidak sesederhana menciptakan toleransi pada perbedaan, namun mendorong penciptaan ruang publik yang memungkinkan interaksi antar budaya yang setara.

Multikulturalisme di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara Barat. Multikulturalisme di Indonesia bukan hasil dari migrasi modern, melainkan hasil dari sejarah panjang pluralisme sosial yang terbagi menjadi fase segregasi kolonial, *melting pot* Orde Baru, dan demokratisasi pasca reformasi (Nurchayono, 2018). Kompleksitas masyarakat multikultural hari ini merupakan oleh-oleh dari

bagaimana rezim kolonial mengatur berbagai kelompok etnis dipaksa untuk hidup bersama tetapi terpisah dalam aspek sosial dan budaya. J.S Furnivall (1948) mengenalkan sebuah konsep "*plural society*", bahwa masyarakat plural cenderung tidak stabil karena nihilnya integritas sosial. Dalam konteks pasca kolonial, masyarakat plural sering kali menghadapi tantangan dalam mencapai kesatuan nasional dan stabilitas politik. Meskipun multikulturalisme lahir dalam perjalanan panjang masa kolonial, akan tetapi kesadaran kolektif terhadap pentingnya multikulturalisme masing rendah (Ahimsa-putra, 2021). Ketidakmampuan dalam membangun solidaritas sosial ini dapat menyebabkan ketegangan antar etnis dan kesulitan membentuk kesatuan. Fenomena multikultural di Indonesia paling kentara dapat ditemukan pada masyarakat urban di kawasan perkotaan, dimana arus migrasi, mobilitas sosial, dan interaksi antar etnis terjadi secara intens.

Masyarakat urban merupakan masyarakat yang kompleks dan majemuk, dimana terdapat banyak kepentingan yang saling berkelindan satu dengan lain yang terdiri dari beragam kelompok etnis, agama, bahasa, profesi dan kelas sosial yang berdampingan dalam suatu ruang geografis. Kota sebagai teritori dari komunitas dicirikan sebagai ruang yang berisi kelompok yang menempati suatu wilayah tertentu yang mengenal pembagian kerja dalam spesialisasi sesuai pada peran dan fungsi dengan kebudayaan atau sistem sosial dimana para anggotanya sadar akan kesatuan mereka untuk berbuat secara kolektif. Hannerz menggunakan istilah "*ways of life*" dalam menjelaskan bahwa masyarakat perkotaan terdiri atas keberagaman pola kehidupan yang tersusun berdasarkan interaksi sosial, ekonomi, serta budaya. Bagi Hannerz kota bukanlah ruang homogen, melainkan arena stratifikasi sosial dan pluralisme budaya. "

Urban life is characterized by a diversity of ways of life, overlapping but also distinct. The city is not one community but a collection of communities with different values, styles, and social patterns." (Hannerz, 1980).

Kompleksitas masyarakat kota salah satunya adalah menyioal sebaran etnis, kota merupakan ruang pertemuan berbagai etnis dengan latar agama, budaya dan ekonomi yang beragam, sehingga pemahaman terhadap relasi urban-etnis penting untuk dikaji dalam diskursus kota sebagai ruang inklusif.

Di banyak kota-kota di Indonesia, dimana kerangka etnis seringkali menjadi penanda kelas sosial dan jenis pekerjaan, yang kemudian menciptakan kantong-kantong komunitas berbasis etnisitas. Etnisitas berpedoman kepada relasi antar kelompok yang anggotanya mendefinisikan diri mereka berbeda dengan kelompok lain (Eriksen, 1993). Selanjutnya Gurr (2004) menyebutkan bahwa etnisitas berangkat melalui atribut-atribut kultural, agama, ras, dan faktor kesamaan sejarah. Melaluinya dapat ditafsirkan bahwa mendiskusikan terkait etnisitas, adalah mewacanakan simpul-simpul perbedaan antar kelompok etnis. Dalam konteks pasar dan ekonomi, pendekatan Bartesian menilai bahwa perbedaan etnis dalam kerangka upaya pembentukan modal sosial berdasarkan etnisitas, akan menyebabkan terciptanya konflik simetri dan asimetri (Bartes, 1999). Konflik yang bersumber dari aktivasi dominasi sumber daya oleh satu etnis terhadap etnis lainnya, bermuara kepada alienasi kelas sosial serta ketimpangan relasi kuasa dan sosial (Daoxin, 2020). Kompleksitas konflik tersebut, utamanya ditengarai oleh perbedaan etnisitas, yang kemudian bersifat rentan dan sensitif, dan sangat dimungkinkan mendorong terjadinya disintegrasi sosial. Relasi antara etnis ini bukan hanya sekedar identitas, asal muasal, dan budaya, tetapi juga ekonomi-politik: siapa yang punya akses dan siapa yang akan termarginalkan (Suryadinata, 2004). Atas kondisi tersebut, kota dapat menjadi medan konflik ketika interaksi sosial gagal menciptakan solidaritas. Kondisi ini tercatat dalam sejarah Kota Surakarta, salah satu kota di Indonesia yang memiliki karakter multikultural kuat.

Surakarta memiliki sejarah panjang sebagai kota multikultur, namun juga menyimpan jejak konflik lintas etnis yang kompleks dan berlapis. Konflik lintas etnis kota ini tidak hanya terjadi pada peristiwa Mei 1998, tetapi telah berlangsung sejak awal abad ke-20. Tercatat pada tahun 1911 terjadi konflik yang dipicu oleh persaingan ekonomi antara pengusaha batik pribumi dan pedagang Tionghoa, yang berlanjut menjadi boikot terhadap perusahaan milik Sie Dhian Ho oleh masyarakat pribumi di Singosaren dan Pasar Gede dan ketegangan sosial lintas etnis (Suharto & Abdurakhman, 2020). Konflik 19-25 November 1980, ketika terjadi kecelakaan sepeda antara pemuda Jawa dan Tionghoa. Ketegangan meningkat ketika pemuda Tionghoa melakukan kekerasan terhadap pemuda Jawa, lalu melarikan diri ke pertokoan milik warga Tionghoa. Ketika massa tidak menemukan pelaku tersebut, mereka mulai melakukan perusakan pertokoan milik warga Tionghoa dan meluas hingga perusakan rumah dan kendaraan milik etnis Tionghoa (Hastuti, T, 2005). Konflik seperti ini dan peristiwa Mei 1998 menjadi bukti bahwa multikulturalisme dapat rapuh jika tidak disertai kesetaraan dan perlindungan sosial dan menunjukkan bahwa identitas etnis dapat menjadi alat mobilisasi kemarahan sosial (Purdey, 2021).

Konflik-konflik lintas etnis di Surakarta hampir secara keseluruhan terjadi di Kawasan Pasar Gede, dimana kawasan tersebut merupakan titik pertemuan berbagai etnis dengan masing-masing kepentingan sosial, ekonomi dan politik. Pasar memiliki kaitan erat dengan kota-kota di Indonesia sebagai kota poskolonial, dimana rezim kolonial mendesain pasar sebagai bentuk kontrol dan dukungan atas kepentingan ekonomi dan politik terhadap masyarakat perkotaan. Lebih lanjut Furnivall (1948) pada konsep "*plural society*" menjelaskan bahwa rezim kolonial

menyekat masyarakat beragam dalam kelompok-kelompok yang diberikan peran serta pemukiman yang terpisah, yang hanya dapat berinteraksi di pasar. Hal tersebut dilakukan guna membatasi hubungan dan menciptakan segregasi sosial. Namun pada hari ini, Pasar Gede di Kota Surakarta yang terbentuk dalam kerangka kota poskolonial dapat menyajikan realitas fenomena yang berbeda. Disaat pasar bertransformasi menjadi ruang publik yang diisi bukan hanya satu etnis/kelompok, justru mampu beradaptasi untuk merawat simpul perbedaan menjadi persatuan dalam bingkai kohesi sosial. Keselarasan ini dapat dijelaskan melalui teori *Commoning* yang diajukan oleh Elinor Ostrom yang berbicara bahwa komunitas dapat mengelola sumber daya bersama secara kolektif melalui prinsip-prinsip kepercayaan, partisipasi, dan aturan lokal (Masouri & Elias, 2025). Pasar Gede menjadi *common space* di mana masyarakat dari berbagai latar belakang berbagai ruang, nilai, dan aktivitas. Proses *commoning* ini menciptakan solidaritas sosial yang tidak dibentuk oleh negara, melainkan oleh komunitas itu sendiri. Dengan demikian, multikulturalisme di Pasar Gede bukan hanya wacana, tetapi praktik sosial yang hidup dan berkelanjutan.

Teteki (2010) mengkaji pasar gede sebagai proyeksi objek dan daya tarik wisata budaya dan kuliner, selain fungsi utamanya sebagai penggerak perputaran roda perekonomian di Kota Surakarta. Kemudian Aliyah et al.,(2015) berupaya mengkaji Pasar Gede, bukan sekedar tempat berlangsungnya interaksi ekonomi semata. Melainkan pasar tradisional yang memiliki nilai historisitas panjang sebagai konsepsi hidup atas terjalannya interaksi sosial budaya di dalamnya. Pada kajian tersebut, peranan Pasar Gede menjadi penting sebagai salah satu komponen ruang kota khas warisan kerajaan Jawa. Seperti konsep "*Catur Gatra Tunggal*", "*Negara Agung*", dan "*Mancapat Mancalima*".

Kemudian Amrinawati (2013) mengeksplorasi interaksi sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di Pasar Gede dengan pendekatan linguistik. Dijelaskan bahwa terdapat fenomena yang menarik, ketika pedagang Tionghoa, melakukan interaksi sosial dengan jual-beli produk ekonomi, menggunakan bahasa Jawa sebagai perantara interaksinya kepada pembeli etnis Jawa. Selain motif ekonomi, keadaan tersebut dikarenakan latar belakang sosial, hingga situasional tutur dan pitutur. Kajian ini menjadi penting, karena sama-sama melihat adanya kohesi sosial di Pasar Gede, antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa.

Tulisan ini berupaya menelaah tentang bagaimana aspek sosio-kultural, melalui tata nilai dan kesepakatan bersama yang ternyata dapat mendorong terciptanya stabilitas dan keselarasan sosial di dalam ruang publik. Sebab sering kali konflik dan kekerasan lahir melalui perbedaan nilai, norma dan prinsip dalam menjalankan kehidupan (Anam et al., 2024). Kajian ini penting dilakukan guna memahami bahwa aspek sosio-kultural dalam dimensi lokal, mampu menjawab tantangan-tantangan dari kompleksitas keberagaman etnis. Secara kontekstual, upaya mendudukan pemahaman Pasar Gede sebagai ruang publik menjadi kajian yang menarik sekaligus mendesak untuk dilakukan. Bahwa proses interaksi sosial yang terjalin di ruang publik masyarakat urban yang terkompleksitaskan melalui latar belakang perbedaan identitas etnis Tionghoa dan etnis Jawa bukanlah proses interaksi yang sederhana, di dalamnya berkelindan dinamika pertalian kepentingan ekonomi dan eksistensi etnisitas. Berangkat dari alasan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan mendasar: apa yang mendasari terbentuknya keselarasan sosial lintas etnis di pasar Gede Hardjonagoro Surakarta terbentuk?. Serta bagaimana pedagang di pasar Gede mewarisi dan merawat keselarasan sosial tersebut?.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penulis secara langsung melakukan penelitian lapangan (field research) terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Gede untuk melihat secara langsung dan melakukan proses wawancara. Fokus penelitian yakni; pertama adalah mengetahui fenomena yang terjadi di Pasar Gede Kota Surakarta, sebagai ruang publik. Kedua, menelaah dan memahami nilai sosio-kultural dapat membentuk kohesi sosial atas inklusivitas relasi yang terjadi. Lokasi penelitian berada di Pasar Gede Hardjonagoro, Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 30 hari dari akhir bulan Agustus sampai dengan awal bulan September guna membangun kedekatan warga Pasar Gede dan memperoleh informasi yang mendalam. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode snowball, sebagai teknis penulis dalam memilih informan dengan bantuan key informant yang memberikan petunjuk untuk menemukan informan selanjutnya (Subagyo, 2006). Metode snowball mengawali pencarian data primer dari satu informan yang sesuai dengan kriteria yang kemudian menarik runtut ke informan yang untuk mendapat informasi yang lebih beragam guna melengkapi data penelitian ini. Informan merupakan pedagang lintas etnis di Pasar Gede Hardjonagoro Surakarta. Observasi lapangan dilakukan secara langsung di area Pasar Gede dan pada masing-masing blok dagang untuk melihat secara langsung aktivitas perdagangan. Selain itu, penulis melakukan pengumpulan data sekunder melalui penelusuran dokumen

artikel yang relevan untuk memperdalam kajian mengenai perjalanan histori dan perkembangan sosial-budaya di Pasar Gede Hardjonagoro Surakarta.

Hasil dan Pembahasan

1. Keberadaan Pasar Gede Hardjonagoro

Mendefinisikan pasar secara umum dapat dipahami sebagai ruang dan tempat terjadinya interaksi jual-beli komoditas yang memiliki nilai ekonomi (Prianto, 2008). Namun, melihat pasar dalam kaca mata yang lebih kompleks, adalah melihat interaksi yang terjadi bukan sekedar interaksi pertukaran ekonomi semata. Akan tetapi, dimungkinkan juga terjadi interaksi sosial, budaya, hingga politik yang begitu elusif. Koentjaraningrat (2015) menekankan bahwa pasar adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat, yang mendorong terciptanya interaksi sosial dan ekonomi. Pasar juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan struktur sosial masyarakat setempat. Melaluinya proses interaksi yang begitu kompleks, dipengaruhi oleh mentalitas masyarakat dalam dinamika pasar dan pembangunan yang berkelindan. Pasar merupakan ruang interaksi sosial yang terbentuk dalam kerangka kepentingan ekonomi, dimana pasar menjadi ruang pertemuan antara pihak penjual dengan pembeli dalam kerangka guna memenuhi kebutuhan masing-masing. Perkembangan pasar terkonstruksi menjadi dua disklasifikasi, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Baik pasar tradisional maupun pasar modern secara fungsi memiliki kesamaan yang menjadi pembeda ialah pasar tradisional mengutamakan keterjangkauan dan negosiasi sedangkan pasar modern mengutamakan kenyamanan dan produk yang sudah diberi label harga (Sadino & Syahbana, 2014). Selain sebagai tempat yang menyediakan produk-produk untuk menjawab segala kebutuhan konsumen dan negosiasi harga, pasar tradisional mampu menjadi tempat yang mendorong interaksi sosial, pertukaran informasi, dan ekonomi rakyat.



Gambar 1. Aktivitas ekonomi di Pasar Gede
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti)

Pasar Gede Hardjonagoro, merupakan salah satu pasar tradisional tertua dan terbesar di Surakarta yang tumbuh seiring dengan pemindahan ibu kota Kasunanan dari Kartasura pada 1745. Awalnya, aktivitas ekonomi berlangsung di los-los kayu sepanjang tepi Kali Pepe, yang kemudian berkembang menjadi embrio Pasar Gede. Bangunan pasar yang berdiri saat ini dibangun pada tahun 1930 oleh arsitek Hindia-Belanda, Thomas Karsten. Karsten mengintegrasikan pendekatan *Indische Architecture* dengan elemen arsitektur Jawa dengan biaya sebesar 650 Gulden dan diresmikan oleh Sinuhun Paku Buwono X.

Meskipun berada di bawah pengaruh kuat pemerintah kolonial, Pasar Gede memiliki keterikatan historis dan simbolik yang erat dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Pasar Gede merupakan bagian integral dari struktur tata ruang kota berbasis konsep *Catur Gatra Tunggal*, yaitu kesatuan antara keraton sebagai pusat pemerintahan, alun-alun sebagai ruang publik, masjid agung sebagai pusat spiritual, dan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Keempat unsur ini, yang kemudian tidak sekedar membentuk struktur fisik kota, tetapi juga mencerminkan sistem nilai kosmologis dan politik kekuasaan Jawa (Slamet, 2013). Melalui konsep kosmologi ini yang kemudian diakui sebagai landasan dalam penataan wilayah milik Keraton Kasunanan yang kemudian mengatur struktur ruang guna dapat berfungsi sebagai unsur pembentukan masyarakat yang dipahami sebagai kesatuan kolektif antara

kebudayaan dan keyakinan. Konsep *Catur Gatra Tunggal* tersebut merupakan konsep kosmologi Jawa yang diterapkan oleh Keraton Kasunanan yang sama dilakukan pada sistem tata ruang pada kerajaan Mataram Islam sebagai pendahulunya, seperti Pajang, Kota Gede, Plered dan Kartasura (Urfan et al., 2022). Dalam konteks kosmologi Jawa, penataan ruang didasarkan pada prinsip seperti *mancapat*, *mancalima*, dan *kiblat papat lima pancer*. *Mancapat* berpedoman pada empat arah mata angin, sedangkan *mancalima* merupakan pemetaan ruang secara hierarkis – dari pusat keraton (tempat tinggal bangsawan dan fasilitas pemerintahan), Kuthanegara (aktivitas ekonomi), hingga Mancanegara (tanah pajak). Pasar Gede termasuk dalam wilayah *Kuthanegara* yang merupakan wilayah yang terletak di luar keraton namun masih dalam lingkup administratif pusat, berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi (Budihardjo, 1986).

Dalam kerangka sosial-politik, pasar mencerminkan struktur kekuasaan Jawa yang simbolik dan hierarkis. Ia bukan sekedar ruang ekonomi, tapi bagian dari tatanan yang melegitimasi peran raja dalam kehidupan rakyat. Hubungan timbal balik antara pasar dan keraton terlihat dalam penataan ruang kota yang mengaitkan pasar dengan alun-alun dan pusat pemerintahan. Penataan ruang ini tidak semata pragmatis, akan tetapi bersifat simbolik yang menandakan relasi rakyat dengan penguasa (Geertz, 1983). Pusat kerajaan dalam sistem politik Jawa klasik bukan sekedar tempat kekuasaan, melainkan sebagai *axis mundi* simbol kerajaan sebagai poros dunia, untuk menunjukkan legitimasi kekuasaan bukan sesederhana kontrol administratif melainkan bentuk kekuatan atas ruang pusat ritual dan spasial (Anderson, 2006).

Dengan demikian Pasar Gede bukan sekedar fasilitas perniagaan, lebih dari gelanggang aktivitas ekonomi melainkan juga sebagai instrumen kekuasaan dan representasi dari sistem tatanan kota kerajaan Jawa yang kompleks. Pertautan kekuasaan politik dan akses ekonomi ini, yang kemudian memicu rezim kolonial dalam menguasai Pasar Gede karena keberadaannya menjadi titik pertemuan lintas kelompok masyarakat. Hal tersebut dapat ditinjau dalam bagaimana rezim kolonial mendesain bangunan Pasar Gede dengan corak bangunan-bangunan ala Belanda, hal tersebut diupayakan guna melemahkan kekuatan keraton dan memperkuat cengkraman terhadap kontrol sumber daya. Perencanaan ruang tersebut menunjukkan minat rezim kolonial untuk mengendalikan aktivitas ekonomi dan menjauhkan simbol-simbol kekuasaan keraton Kasunanan dari ruang-ruang publik. Pasar-pasar utama pada kota-kota kerajaan seperti Surakarta dan Yogyakarta berperan sebagai penyangga ekonomi keraton dan ruang relasi sosial penguasa dengan rakyat bertemu, yang kemudian oleh kolonialisme berupaya memisahkan kekuatan ekonomi ini dari pengaruh raja (Carey, 2007). Hingga saat ini Pasar Gede mencerminkan warisan ganda, yakni sebagai simbol ekonomi rakyat yang bertaut dengan keraton namun sebagai bangunan merupakan hasil rasionalisasi kolonial, pasar Gede bertransformasi menjadi ruang negosiasi identitas lokal dan kuasa kolonial yang sebagai fungsinya tetap sebagai pasar tradisional.

Pasar Gede Hardjonagoro tampil sebagai salah satu pasar tradisional yang dapat memvisualisasikan dirinya, sebagai pasar yang berkarakter kuat secara nilai-nilai sosial dan budaya. Nilai demikian terkodifikasi secara langsung dan tidak langsung dalam skemata sosio-kultural. Selain aspek historis yang dapat menyuguhkan secara koheren, investasi kekayaan sosio-kultural atas keberagaman identitas yang tercipta di Pasar Gede. Menelaah hal tersebut, juga menelaah secara mendalam terkait hubungan atas interaksi yang terjadi. Dalam konteks ini pendekatan relasi, menyebutkan bahwa tidak ada satu kelompok manapun dapat berdiri sendiri. Kaitannya dalam hubungan produksi dan ekonomi yang terbangun melalui relasi secara merantai dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Pasar Gede tidak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi tradisional, tetapi sebagai ruang interaksi sosial yang mencerminkan keberagaman masyarakat multikultural di kota Surakarta. Etnis Tionghoa dalam perjalanannya memiliki peran besar dalam perjalanan perkembangan Pasar Gede. Sejak abad ke-19 banyak warga Tionghoa yang menetap dan berdagang di sekitaran pasar khususnya dalam sektor perdagangan bahan pokok, barang konsumsi harian, dan obat-obatan. Kehadiran etnis Tionghoa tampak jelas dalam arsitektur toko, ornamen khas imlek yang menghiasi kawasan Pasar Gede setiap awal tahun baru Tionghoa, dan penggunaan bahasa Mandarin atau Hokkien. Di sisi lain, komunitas masyarakat Jawa yang berposisi sebagai kelompok etnis mayoritas tetap menjaga tradisi yang berlaku, dapat kita temukan berbagai jenis makanan tradisional yang dijual serta penggunaan bahasa Jawa yang berlaku lintas etnis dalam interaksi sehari-hari.

Saat ini, Pasar Gede Hardjonagoro telah berkembang menjadi pasar terbesar di Surakarta yang menyediakan segala kebutuhan sehari-hari, tekstil, obat-obatan, hingga barang-barang antik. Hal yang menarik dari perkembangan pasar Gede ini adalah menjadi salah satu destinasi pariwisata di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berambisi membangun kota yang lebih terbuka untuk pengunjung dengan menonjolkan nilai histori dan budaya di Surakarta, Pasar Gede menjadi salah satu destinasi wisata yang menyuguhkan kuliner-kuliner lokal. Dengan demikian, perkembangan Pasar Gede tidak hanya sebagai pasar pada umumnya, melainkan sebagai pasar yang lekat dengan identitas kebudayaan dan *branding* Kota Surakarta.

2. Ruang Produksi dan Kontestasi Kepentingan.

Ruang dalam perkembangan perspektif ilmu sosial kontemporer bukanlah entitas kosong atau sekedar wadah bagi manusia dalam beraktivitas, ruang dipahami sebagai produk dari relasi sosial yang kompleks, dimana relasi historis, kekuasaan, ekonomi, dan budaya saling berkelindan. Konsep ruang produksi yang dikembangkan oleh Henri Lefebvre (1991) membuka pemahaman bahwa ruang selalu diproduksi oleh dan untuk tujuan tertentu. Pasar merupakan bentuk konkret dari ruang produksi, yang didalamnya tidak sebatas media dalam mediasi antara penjual dan pembeli barang, melainkan sebuah cerminan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Ruang produksi dalam praktik sehari-hari di pasar dapat dipahami secara langsung, seperti dimana posisi kios, jalur distribusi barang, hingga siapa yang memiliki akses pada informasi dan akses pada jaringan modal yang kemudian menjadi bagian dari proses produksi ruang itu sendiri. Pasar Gede sebagai ruang publik merupakan wujud dari tatanan sosial dan kekuasaan yang terus menerus mengalami perubahan. Di Pasar Gede ini, terjadi interaksi lintas etnis terutama etnis Jawa dengan

Tionghoa yang saling berbagi ruang. Komunitas Tionghoa sejak abad 19-an pada masa perebutan rezim kolonial terhadap keraton Kasunanan telah memainkan peran dominan dalam ekonomi Pasar Gede, khususnya dalam perdagangan grosir dan jaringan distribusi barang. Sebaliknya, etnis Jawa lebih banyak berperan sebagai pedagang kecil, pekerja informal, dan konsumen.



Gambar 2. Penjual ikan dan ayam potong menjajakan dagangannya.
(Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti)

Pasar Gede sebagai ruang produksi sosial yang di dalamnya mengandung relasi kekuasaan dan perebutan akses sumber daya maka akan tercipta potensi konflik. Ketika beragam aktor yang berbeda-beda seperti pedagang kecil, pemilik ruko, dan pemerintah daerah memiliki kepentingan yang tidak sejalan maka Pasar Gede dapat berubah menjadi arena perebutan ruang yang rumit. Ruang publik dimaknai sebagai ruang untuk rekonsiliasi antara kepentingan dan identitas yang saling bertentangan, dan secara konsisten direpresentasikan sebagai panggung dalam negosiasi lintas kepentingan dengan menggunakan hipotesis kesetaraan yang akan terus menerus diperbaharui (Espinosa & Contijoch, 2021). Dalam konteks Pasar Gede di Surakarta, produksi ruang terlihat dari bagaimana cara ruang dikelola, diduduki serta diklaim oleh berbagai kelompok, dimana para pedagang, pembeli, pengelola pasar, hingga otoritas pemerintah memainkan peran vital dalam menentukan bagaimana Pasar Gede sebagai ruang sosial digunakan. Sebab, posisi strategis terhadap pasar sering kali didapatkan secara tidak terpola atau acak, tetapi melalui jaringan sosial dan relasi ekonomi. Dengan kata lain, produksi ruang di Pasar Gede menyiratkan kekuasaan yang kompleks.

Konfigurasi lintas etnis yang didasarkan pada perebutan sumber daya yang terbatas di Pasar Gede ini, yang kemudian dapat menyulut adanya ketimpangan. Ketimpangan ini tidak melulu menimbulkan konflik terbuka, namun dapat menciptakan kondisi laten berupa lahirnya rasa keterpinggiran, kecemburuan sosial dan keresahan yang di kemudian hari dapat memicu terjadi konflik horizontal di Pasar Gede. Negosiasi perebutan ruang dan sumber daya sehari-hari di Pasar Gede berlangsung dalam bentuk persaingan lokasi berjualan, perebutan pelanggan dan manuver politik paguyuban-paguyuban atau asosiasi pedagang. Perebutan ruang ini bukan sekedar menyoal lokasi fisik, melainkan berkaitan dengan legitimasi sosial, representasi budaya dan kontrol terhadap tata kelola pasar. Masyarakat Tionghoa dan Jawa merupakan dua kelompok etnis utama di Pasar Gede. Interaksi kedua etnis

tersebut meskipun seringkali dalam kondisi yang harmonis dalam praktik keseharian menyimpan potensi konflik karena perbedaan posisi struktural dalam ekonomi pasar. Dalam konteks sejarah perkembangan relasi etnis Tionghoa dengan pribumi dibentuk oleh sejarah panjang diskriminasi dan stereotip. Etnis Tionghoa di Indonesia telah lama menempati posisi yang tidak menentu, menonjol dalam ekonomi namun rentan secara sosial dan politik (Hefner, 2001). Di tingkatan lokal seperti Pasar Gede, dinamika lintas etnis dimediasi oleh masing-masing budaya yang mengedepankan konsensus. Pada situasi kontestasi ini, multikulturalisme dapat mempromosikan keadilan sosial, akses yang setara dan kesempatan bagi kaum minoritas dan kelompok tertindas (Neslon et al., 2022). Hal demikian disampaikan juga oleh Manto pedagang bunga di Blok Bunga di Pasar Gede, yang memperkenalkan diri dengan sebutan *Mbah Manto*, menyampaikan bahwa nilai menghargai sesama pedagang dan tidak mengganggu satu dengan lain merupakan bentuk dalam merawat kerukunan di Pasar Gede.

Interaksi antar pedagang dari latar belakang etnis yang berbeda di Pasar Gede, Kota Surakarta, mencerminkan dinamika kontestasi dan persaingan yang kompleks. Setiap kelompok etnis—baik Tionghoa maupun Jawa-Muslim—memiliki karakteristik dan metode berdagang yang khas, yang seringkali menjadi sumber potensi gesekan. Konflik laten ini dapat muncul dalam bentuk persaingan harga, penempatan lokasi lapak, maupun jenis komoditas yang diperdagangkan, sebagaimana tercermin dalam riwayat konflik pada tahun-tahun sebelumnya. Contoh konkret interaksi lintas etnis ditunjukkan oleh Devi, seorang pedagang daging babi dari komunitas Tionghoa yang mewarisi usaha keluarganya sebagai generasi ketiga. Devi menempati lapak yang berdampingan dengan seorang pedagang pakaian dari komunitas Jawa-Muslim. Ia membuka usahanya setiap hari dari pukul 05.00 hingga 09.00 WIB, sebelum pedagang pakaian tersebut mulai beraktivitas pada pukul 09.00 WIB. Dalam wawancara, Devi menegaskan komitmennya terhadap kebersihan lapak, terutama saat hendak menutup jualan. Ia menyadari bahwa produk dagangannya—daging babi—dapat memunculkan ketidaknyamanan, terutama bagi kelompok yang mengharamkan konsumsi tersebut. Upaya menjaga kebersihan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan etika sosial yang dianut oleh komunitas di sekitarnya, serta sebagai strategi untuk memelihara harmoni sosial di ruang aktivitas ekonomi yang plural.

Perebutan ruang dan sumber daya yang terbatas di Pasar Gede akan menimbulkan konflik yang lebih tajam ketika terjadi krisis atau tekanan. Sebab perebutan akses yang terbatas dapat melahirkan pertentangan antar kepentingan. Guna memahami potensi konflik lintas etnis di Pasar Gede, maka diperlukan tinjauan terhadap peristiwa-peristiwa sejarah yang menunjukkan konflik-konflik lintas etnis. Salah satu peristiwa yang mencolok dalam sejarah konflik etnis di Surakarta terjadi pada Mei 1998, kerusuhan sosial yang meluas secara nasional berdampak pada kawasan Pasar Gede. Dalam peristiwa Mei 1998 ini banyak toko milik etnis Tionghoa menjadi sasaran penjarahan dan kekerasan massa. Berbagai bangunan yang dianggap “berbau Tionghoa” dirusak, dibakar, dan dijarah yang berdampak mematikan sendi perekonomian kota Surakarta (Budiaty, 2010). Meskipun Pasar Gede dan Surakarta tidak mengalami kerusakan separah wilayah Jakarta atau Medan, kejadian tersebut masih menorehkan trauma besar pedagang di Pasar Gede dan terkhusus bagi etnis Tionghoa. Pada era Orde Baru, terdapat praktik-praktik diskriminatif yang terstruktur terhadap etnis Tionghoa. Kebijakan seperti larangan menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari, pembatasan kepemilikan tanah, serta kewajiban mengganti nama diri kedalam bentuk nama-nama dalam kebudayaan Indonesia dan Jawa yang menjadi faktor memicu keterasingan dan ketidakpercayaan antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi. Di tingkat lokal pada Pasar Gede terdapat pembatasan-pembatasan akses ruang di dalam pasar yang didasarkan pada perbedaan etnis, dimana terdapat banyak batas yang bertuliskan “kios milik Tionghoa” dan sebaliknya “kios milik pribumi” hal ini banyak ditemukan pada era Orde Baru sebagai bentuk kontrol ketat terhadap identitas dan gerak warga Tionghoa, batas-batas penanda tersebut terkadang mengeras dan menjadi sekat sosio-kultural.

Dinamika konflik etnis di Pasar Gede tidak dapat terlepas dari jejak kolonialisme Belanda yang secara sistematis membagi masyarakat Hindia Belanda dalam stratifikasi sosial berdasarkan ras dan etnis. Pemerintah kolonial Hindia Belanda secara sistematis membagi masyarakat menjadi 3 golongan besar, yaitu, kelompok masyarakat Eropa, kelompok masyarakat Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), dan Pribumi (*Inlander*) (Tutasqiyah et al., 2023). Implikasi pembagian golongan ini tidak sekedar bersifat administratif, melainkan menentukan hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda pada setiap golongan tersebut. Masyarakat Tionghoa yang termasuk kedalam (*Vreemde Oosterlingen*). ditempatkan pada posisi ambivalen, yakni bukan bagian dari golongan elite kolonial Eropa tetapi juga tidak dikategorikan sebagai rakyat pribumi. Struktur stratifikasi desain rezim kolonial tersebut memosisikan etnis Tionghoa sebagai perantara ekonomi terutama dalam sektor perdagangan. Di Surakarta, termasuk Pasar Gede dalam kerangka histori, kelompok etnis masyarakat Tionghoa diberikan keleluasaan dalam menjalankan roda perekonomian dan tumpuan utama distribusi barang di wilayah Surakarta yang kemudian menyediakan kebutuhan pokok, tekstil, dan barang-barang impor. Kebijakan pemerintah kolonial terhadap ketimpangan etnis di sektor ekonomi menyebabkan berkembangnya rasa terpinggirkan di kalangan

pribumi (Setiono, 2003). Pertarungan dalam perebutan akses terhadap Pasar Gede sebagai ruang produksi ini semakin kompleks ketika rezim kolonial memberikan dukungan administratif terhadap pemimpin komunitas Tionghoa, pemimpin komunitas ini bertanggung jawab sebagai perantara kebijakan kolonial dan komunitas Tionghoa.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengangkat pemimpin komunitas Tionghoa yang disebut Kapitan, Mayor Cina atau Babah Mayor sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial di Surakarta, Jabatan ini berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum warga Tionghoa. Kapitan atau Mayor Cina bertugas dalam menjaga ketertiban wilayahnya, mengatur perdagangan di Pasar Gede, serta memungut pajak yang kemudian diserahkan ke pemerintah kolonial. Para pemimpin komunitas Tionghoa ini, melalui jaringan sosial dan ekonominya, turut memainkan peran dalam penguasaan kios, jalur distribusi, dan penyediaan barang-barang impor, yang memperkuat dominasi etnis Tionghoa di sektor perdagangan. Mayor Cina berperan penting dalam mendistribusikan izin usaha dan pengelolaan ruang dagang, peran ini menjadikan elite Tionghoa sebagai penghubung antara kekuasaan kolonial dan kontrol ekonomi lokal (Wibowo, 2014). Struktur kepemimpinan Kapitan atau Babah Mayor tidak hanya menjadi simbol representasi etnis, tetapi menjadi agen kekuasaan yang terlibat dalam penguasaan sektor perdagangan dan pengaturan ruang pasar. Peran pemimpin komunitas Tionghoa ini akan memperkuat eksklusifitas akses terhadap sumber daya ruang dan akses ekonomi di Pasar Gede Surakarta sedangkan masyarakat pribumi sering kali hanya mendapatkan akses ruang pasar sebagai buruh angkut dan pedang kecil kaki lima atau pelapak informal.

Meski struktur kolonial seperti ini belum melahirkan konflik-konflik terbuka, akan tetapi struktur ini menambahkan benih-benih antagonisme laten yang pada masa-masa berikutnya mudah tereskalasi yang kemudian dapat terlihat pada konflik pasca kemerdekaan dan selama krisis sosial-politik di era Orde Baru. Meskipun tidak semua ketengan dapat dikategorikan sebagai konflik etnis murni, identitas etnis sering kali menjadi perangkat naratif yang digunakan dalam mengorganisasi protes atau resistensi terhadap dominasi ekonomi dan politik (Horowitz & Kuper, 1986). Sedangkan dinamika perebutan dan penguasaan ruang di Pasar Gede ini bercorak pada kepentingan ekonomi dan politik yang didasarkan pada etnisitas, sehingga tidak menutup kemungkinan konflik-konflik lain akan mencuat. Warisan kolonial pengelompokan sosial berdasarkan etnis terus hidup dan mempengaruhi relasi sosial dalam ruang-ruang ekonomi seperti pasar hingga saat ini (Purwanto, 2012). Dengan demikian pasar Gede sebagai ruang produksi yang terbatas mengalami intervensi kepentingan-kepentingan yang kompleks, dimana dalam perjalannya selalu erat dengan kepentingan sosial, ekonomi dan budaya yang berubah-ubah. dapat dilihat Pasar Gede menjadi arena penting untuk menyangga kepentingan Keraton Kasunanan yang kemudian mengalami perubahan besar dari rezim kolonial untuk memperkuat kedudukan di Hindia Belanda dan melemahkan posisi Keraton Surakarta.

3. Pasar Gede sebagai *Commons* dan Ruang Negosiasi Sosial.

Upaya dalam menghimpun dan mengorganisasi sumber daya dalam satu komunitas pasar sebagai ruang bersama dapat dimaknai sebagai gerakan *commoning*. *Commoning* di bagian ini berfungsi sebagai kata kerja, bukan dalam membangun *commune* atau suatu komunitas yang bersifat homogen dan eksklusif, tetapi guna mengupayakan *commons* yang dapat digunakan dan diakses secara kolektif. Meskipun terdapat potensi konflik, Pasar Gede menunjukkan kapasitas masyarakat dalam menciptakan ruang bersama yang harmonis yang dilakukan melalui bentuk-bentuk pengelolaan kolektif atas sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh warga Pasar Gede. Konsep *Commons* lahir dari Garret Hardin pada tahun 1968 dalam karya "*The Tragedy of The Commons*" (Garrett Hardin, 2010). Hardin menggunakan ruang terbuka seperti padang rumput terbuka di Inggris yang digunakan dalam menggembala ternaknya sebagai contoh dalam menjelaskan gagasan ini. Hardin berpendapat bahwa ruang semacam ini tidak akan sampai pada konsep keberlanjutan dan sumber daya bersama akan selalu mengalami degradasi, sebab keserakahan individu yang berebut menggunakan peluang terbuka secara gratis dan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya dalam mengurus ruang terbuka adalah dengan menggunakan pendekatan privatisasi dan kapital, hal itu yang kemudian oleh hardin disebut sebagai "tragedi" sebagai nasib tidak beruntung dari sebuah *commons*.

Teori Hardin ini kemudian dibantah oleh Elinor Ostrom yang dalam karya klasiknya dengan judul *Governing the Commons*, Ostrom mendasarkan gagasan ini dari mengamati pada praktik-praktik komunitas di Amerika latin. Berbeda dari Hardin yang melihat ruang dari orientasi pada tatanan liberal, Ostrom berpendapat bahwa ruang terbuka untuk publik justru dapat berkelanjutan apabila sumber daya tersebut dalam pengelolaannya dikelola melalui pendekatan partisipatif, demokratis, dan inklusif. "*When individuals are willing to commit themselves to following rules that are costly in the short run but beneficial in the long run, self-governance can be successful*" (Ostrom, 1990). Ostrom menekankan bahwa "*rules-in-use*" atau aturan praktis yang muncul dari pengalaman kolektif jauh lebih

penting dari pada dengan aturan formal yang bersifat dari luar dan kemudian dipaksakan untuk dipraktikkan. Dalam *commoning* menunjukkan bahwa komunitas lokal dapat bergerak secara kolektif dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya. Dengan melalui sistem norma, nilai, aturan, dan praktik sosial yang dibentuk bersama yang bukan hanya soal pengaturan sumber daya dan ruang melainkan juga menciptakan relasi sosial yang memperkuat rasa memiliki bersama.

Pasar Gede Hardjonagoro merupakan suatu ruang multikultural yang mencerminkan praktik *commoning* yang dapat dilihat secara aktual dan faktual. Dengan pendekatan inklusif dan menghormati identitas setiap kelompok, masyarakat multikultural dapat berkembang menjadi ruang sosial yang adil dan toleran (Shoffa Nada et al., 2025). Sebagai pasar tradisional yang ada sejak era rezim kolonialisme, Pasar Gede telah dihuni berbagai komunitas lintas etnis yang secara bersama mengelola dan mempertahankan keberlanjutan pasar. Misalnya, pembagian zonasi antara pedagang bahan pokok, kelontong, dan makanan tidak selalu berasal dari peraturan resmi, melainkan terbentuk melalui proses pengalaman kolektif dan proses panjang negosiasi. Pasar Gede sebagai ruang diatur melalui kesepakatan informal, bahwa siapa menjual apa, di mana, dan kepada siapa. *Congruence between appropriation and provision rules and local conditions* (Ostrom, 1990). Pedagang di pasar Gede dengan berbagai latar belakang etnis menyesuaikan diri dengan norma pasar yang telah berkembang berdasarkan pengalaman kolektif dan kebiasaan setempat yang sudah berjalan lama. Praktik perdagangan di Pasar Gede tidak sepenuhnya bersandar pada aturan-aturan formal dari pemerintah kota, warga Pasar Gede membentuk sistem pengaturan mandiri dalam penggunaan lahan dagang, penentuan waktu buka dan tutup, hingga mekanisme saling menjaga ruko satu dengan yang lainnya.

Pasar Gede sebagai ruang bersama yang terbatas sumber dayanya, maka sangat penting dalam menetapkan batasan yang jelas (*clearly defined boundaries*) dalam merawat keberlanjutan Pasar Gede sebagai *commons*. Batasan ini dapat dilihat dalam pembagian blok-blok dagang yang mencerminkan struktur ruang yang kompleks dan berlapis melalui perjalanan sejarah, kebutuhan ekonomi, serta dinamika sosial dan budaya para pelaku pedagang dan pengunjung pasar. Pasar Gede dibagi menjadi beberapa blok dan zona berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan yang kemudian bertujuan untuk memudahkan konsumen mencari barang yang dibutuhkan serta mengatur arus pergerakan manusia di dalam pasar. Batasan ruang yang diakses dan dikelola dalam Pasar Gede sebagai *commons* ini lahir dari perjalanan histori dan negosiasi antara aktor pada ruang tersebut, hal ini menjadi dasar fondasi dari tata kelola dan interaksi. Melalui *clearly defined boundaries* ini menekankan siapa yang boleh menggunakan dan mengelola sumber daya serta menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan *commons*. Sebab tanpa batas ini maka berpotensi melahirkan apa yang digambarkan oleh Hardin "*tragedy of the commons*" – sumber daya habis karena digunakan tanpa tanggung jawab bersama atas Pasar Gede. Batas dalam Pasar Gede ini bukan berarti membangun pagar eksklusif, melainkan menciptakan struktur sosial dan komunitas yang mengelola Pasar Gede secara gotong royong guna berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan. Pembagian ruang ini tidak sepenuhnya didasarkan pada peraturan formal pemerintah kota atau pengelola pasar, banyak lapak dan kios di Pasar Gede ditentukan melalui mekanisme informal seperti warisan keluarga, negosiasi antar pedagang, atau kesepakatan paguyuban. Sebagai contoh para penjual jajanan pasar di gerbang utama bagian barat, dimana pedagang mendapatkan tempat tersebut dari meneruskan usaha milik orang tuanya.

Tabel 1. Pembagian Zona Pasar Gede Hardjonagoro (Sumber: Temuan Data Pribadi Peneliti)

Zona Pasar	Lokasi Fisik	Jenis Komoditas	Etnisitas Pedagang	Keterangan Sosial-Spasial
Pasar Atas	Lantai atas sisi timur	Ikan laut dan daging segar (sapi, domba)	Jawa	Zona tertutup kaca, segregasi komoditas berdasarkan agama (daging babi terpisah di ujung blok)
	Ujung blok timur	Daging babi	Tionghoa	Isolasi komoditas berbasis tabu konsumsi
	Lantai atas sisi selatan dan barat	Bunga hias dan grosir buah	Jawa	Fungsi estetika dan konsumsi rumah tangga
	Lantai atas sisi utara	Ayam potong	Tionghoa	Zona produk hewani spesifik
Pasar Bawah	Lantai bawah sisi utara	Ayam potong dan ayam petelur	Jawa	Komoditas protein harian, cerminan pola konsumsi lokal
	Lantai bawah sisi selatan	Grosir buah dan sayur	Tionghoa	Menghadap Jalan RE. Martadinata, dekat Klenteng Tien Kok Sie
	Lantai bawah sisi timur	Warung makan dan kelontong	Jawa	Zona ekonomi mikro, ruang peralihan antara konsumsi dan sosial
	Lantai bawah sisi barat	Jajanan khas, makanan etnik (Bakcang, Lumpia, Nasi Liwet, dll)	Campuran (Jawa dan Tionghoa)	Zona depan pasar, berfungsi sebagai pintu atraksi pengunjung
	Bagian tengah pasar	Sembako, kebutuhan rumah tangga, wisata kuliner	Campuran (Jawa dan Tionghoa)	Zona paling padat dan fleksibel, simbol interaksi multikultur dan gaya jualan terbuka

Batasan ruang yang diakses dan dikelola dalam Pasar Gede sebagai *commons* ini lahir dari perjalanan histori dan negosiasi antara aktor pada ruang tersebut, hal ini menjadi dasar fondasi dari tata kelola dan interaksi. Melalui *clearly defined boundaries* ini menekankan siapa yang boleh menggunakan dan mengelola sumber daya serta menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan *commons*. Sebab tanpa batas ini maka berpotensi melahirkan apa yang digambarkan oleh Hardin "*tragedy of the commons*" – sumber daya habis karena digunakan tanpa tanggung jawab bersama atas Pasar Gede. Batas dalam Pasar Gede ini bukan berarti membangun pagar eksklusif, melainkan menciptakan struktur sosial dan komunitas yang mengelola Pasar Gede secara gotong royong guna berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan. Pembagian ruang ini tidak sepenuhnya didasarkan pada peraturan formal pemerintah kota atau pengelola pasar, banyak lapak dan kios di Pasar Gede ditentukan melalui mekanisme informal seperti warisan keluarga, negosiasi antar pedagang, atau kesepakatan paguyuban. Sebagai contoh para penjual jajanan pasar di gerbang utama bagian barat, dimana pedagang mendapatkan tempat tersebut dari meneruskan usaha milik orang tuanya.

Paguyuban dan atau kelompok dagang di Pasar Gede pada hari ini memiliki posisi yang sangat penting, paguyuban di sini berperan sebagai fasilitator dalam mendudukan banyak aktor ketika mengambil keputusan terutama terkait penempatan, renovasi atau distribusi fasilitas, atau respon terhadap kebijakan-kebijakan terbaru. Sebagai contoh ketika masa Covid-19 yang disampaikan oleh Ibu Nanik seorang etnis Jawa beragama Kristen yang berdagang daging babi di Pasar Gede, Ibu Nanik bercerita bahwa paguyuban dagang mewakili seluruh pedagang dalam pertemuan guna membahas penerapan normalisasi kehidupan baru di kawasan Pasar Gede. Selain itu Ibu Nanik bercerita pada tahun 2014, pernah terjadi gesekan lintas etnis sesama pedagang daging di Pasar Gede, yang kemudian dimediasi melalui paguyuban pedagang untuk mengontrol agar konflik tidak menyebar luas dan berkepanjangan. Hal ini merupakan proses bagaimana warga Pasar Gede dalam membangun *commoning* melalui *collective choice arrangements* dan *conflict resolution mechanisms*, yakni pengambilan keputusan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang dilakukan menggunakan pendekatan informal.

Dalam kerangka pemikiran Elinor Ostrom, *commoning* merujuk pada proses kolektif di mana komunitas lokal secara aktif membentuk, mengelola, dan mempertahankan sumber daya bersama melalui tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan. Pengelolaan Pasar Gede sebagai sumber daya bukan sekedar mekanisme ekonomi, melainkan landasan sosial memungkinkan terciptanya interaksi lintas identitas. *Commoning* yang tercipta dalam perayaan Grebeg Sudiro di kawasan Pasar Gede, merupakan upaya nyata dalam meningkatkan multikulturalisme di Kota Surakarta dan menghindari konflik-konflik lintas etnis seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Grebeg Sudiro merupakan bentuk perayaan otentik yang berlangsung di kawasan Pasar Gede Surakarta, perayaan ini dilakukan menjelang tahun baru Imlek. Perayaan menyambut imlek ini merupakan simbol keselarasan sosial dan simbol pertemuan kebudayaan besar yakni Jawa dan Tionghoa yang saling berkelindan dalam kerangka histori yang panjang dan kemudian dapat membaur dalam satu ruang kohesi sosial. Pusat kegiatan Grebeg Sudiro ini berlangsung di sekitar Pasar Gede, yang dimana dikenal secara luas sebagai ruang interaksi utama antara komunitas Jawa dengan Tionghoa. Beberapa hal yang menarik dari *grebeg* ini adalah tidak hanya menampilkan arak-arakan kue keranjang raksasa dan barongsai, melainkan juga melibatkan kolaborasi lintas komunitas yang berbeda latar etnis dan agama. Dalam kerangka *commoning*, Grebeg Sudiro menunjukkan bagaimana komunitas lokal membentuk tatanan sosial bersama melalui jaringan partisipatif yang diarahkan pada kerangka yang lebih luas, dari skala pasar ke arah skala kota. Pengelolaan sumber daya bersama yang berkelanjutan bergantung pada *nested enterprises*, yakni struktur kelembagaan yang membangun kerjasama dari level lokal hingga antar komunitas yang lebih luas (Ostrom, 1990). Grebeg Sudiro merupakan representasi konkret dari gagasan tersebut, dimana pelibatan berbagai elemen masyarakat dari pemerintah kota, komunitas Tionghoa, seniman Jawa, dan pedagang pasar menunjukkan warga Pasar Gede dalam membangun jaringan sosial lintas batas identitas. Dengan membangun Pasar Gede sebagai titik temu budaya, kelompok lintas etnis tidak hanya berbagi ruang tetapi juga secara simbolik. Hal ini menunjukkan bahwa pasar Gede bukan sekedar ruang ekonomi, melainkan proses *commoning* yang terus berkembang melalui solidaritas dan pengakuan identitas, serta relasi yang luas antar komunitas.

Kesimpulan

Pasar Gede di Surakarta merupakan ruang sosial-ekonomi yang kompleks dan dinamis, dihuni oleh dua kelompok etnis utama yaitu Tionghoa dan Jawa. Hubungan antar etnis ini mencerminkan kombinasi harmonisasi sekaligus ketegangan yang berasal dari struktur sosial dan sejarah panjang diskriminasi serta ketidaksetaraan ekonomi. Dari perspektif historis, posisi ambivalen etnis Tionghoa yang lahir dari pembagian struktur sosial oleh rezim kolonial Hindia Belanda telah menempatkan mereka dalam dominasi ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan distribusi barang. Struktur kepemimpinan komunitas Tionghoa melalui jabatan Kapitan atau

Mayor Cina sebagai perpanjangan tangan kekuasaan rezim kolonial turut mengukuhkan kontrol mereka terhadap ruang ekonomi di Pasar Gede. Namun pada saat kebijakan Orde Baru dilakukan, etnis Tionghoa mengalami marginalisasi sosial-politik. Sementara itu, dalam perjalanan Pasar Gede di era kolonial, masyarakat pribumi lebih banyak mengisi posisi yang kurang berdaya dalam hierarki pasar, seperti pedagang kecil atau buruh angkut. Kondisi semacam ini menjadi akar potensi konflik, terutama ketika sumber daya pasar yang terbatas harus diperebutkan dan ketika terjadi tekanan sosial-politik, seperti kerusuhan Mei 1998 yang berdampak besar pada pedagang Tionghoa.

Namun, di tengah potensi konflik tersebut, Pasar Gede juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membangun ruang bersama sebagai *commons* melalui praktik pengelolaan kolektif yang berkelanjutan. Konsep *commoning* yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom menjadi relevan untuk memahami bagaimana pedagang dari beragam latar etnis mengembangkan aturan tidak tertulis dan norma sosial yang mengatur pembagian ruang dan sumber daya pasar. Pembagian zonasi komoditas serta pengelolaan akses ruang dilakukan melalui mekanisme informal seperti warisan keluarga dan negosiasi antar pedagang, bukan semata berdasarkan regulasi formal. Paguyuban pedagang berperan penting sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan kolektif, seperti yang terlihat dalam masa pandemi Covid-19 maupun dalam mediasi ketika terjadi gesekan antar pedagang.

Simbol kekuatan kohesi sosial dan *commoning* di Pasar Gede dapat dilihat dalam perayaan Grebeg Sudiro yang melibatkan partisipasi lintas etnis dan agama. Hal ini menegaskan bahwa pasar sebagai arena interaksi budaya dan sosial yang saling membangun identitas dan solidaritas bersama. Perayaan ini bukan sekedar ritual budaya, melainkan manifestasi nyata dari bagaimana komunitas lokal dapat membangun jaringan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, melewati batas-batas etnis dan agama yang selama ini sering menjadi narasi atas perpecahan. Dengan demikian, Pasar Gede Hardjonagoro bukan hanya sekedar ruang ekonomi, melainkan juga ruang negosiasi sosial dan budaya yang mampu menyatukan perbedaan. Studi ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman sosial dan praktik pengelolaan elemen lokal dalam menjaga harmoni serta keberlanjutan ruang-ruang publik multi etnis di perkotaan Indonesia.

References

- Ahimsa-putra, H. S. (2021). From pluralism to multiculturalism: Challenges in Indonesia. In *Proceedings of the International Seminar on Cultural Sciences, ISCS 2020*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2020.2308923>
- Aliyah, I., Setioko, B., & Wisnu, P. (2015). Eksistensi pasar tradisional dalam kearifan budaya Jawa (obyek studi: Pasar Gede Kota Surakarta). In *Proceedings of the Conference on Urban Studies and Development* (pp. 93–109)
- Amrinawati, A. (2013). Analisis campur kode pedagang etnis Cina dalam transaksi jual beli di Pasar Gede Surakarta. *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans*, 26(4). Free and Hanseatic City of Hamburg.
- Anam, S., Handayani, N., & Khairurrizki, K. (2024). Konflik antar etnik-agama dan pembangunan perdamaian di lombok: sebuah eksplorasi everyday peace di lombok utara. 6(2), 175–196. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v6i2.613>
- Anderson, B. (2006). *Komunitas-komunitas Imajiner: Refleksi tentang asal-usul dan penyebaran nasionalisme*. LP3ES.
- Bates, R. H. (1999). *Ethnicity, capital formation, and conflict* (Working Paper No. 99–11). Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University.
- Budiati, A. (2010). Ketahanan masyarakat kota solo (model pengelolaan konflik tionghoa – jawa melalui pendekatan ketahanan masyarakat). *Jurnal Sosiologi*, 25(2), 70–78.
- Budihardjo, E. (1986). *Arsitektur Kota Jawa: Kajian Historis Perkembangan Perkotaan*. PT Gramedia.
- Carey, P. (2007). *Asal-usul Perang Jawa: Pemberontakan Diponegoro, 1825-1830* (Terjemah). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Daoxin, S. (2020). Comparison of social stratification theories between Marx and Weber. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 5(6), 1838–1841. <https://doi.org/10.22161/ijels.56.7>
- Eriksen, T. H. (1993). *Ethnicity and Nationalism* (2nd ed.). Pluto Press.
- Espinosa, H., & Contijoch, M. (2021). Public Space and its Discontents. Informality and Urban Conflict. *AIBR, Revista de Antropologia Iberoamericana*, 16(02). <https://doi.org/10.11156/aibr.160203e>

- Furnivall, J. S. (1948). *Colonial policy and practice: A comparative study of Burma and Netherlands India*. New York University Press.
- Hardin, G. (2010). The tragedy of the commons. *American Association for the Advancement of Science*, 162(3859), 1243–1248. <http://www.jstor.org/stable/1724745>
- Geertz, C. (1983). *Agama Jawa: Abangan, santri, priyayi dalam kebudayaan Jawa*. LP3ES.
- Grishaeva, E. B. (2012). Multiculturalism as a central concept of multiethnic and polycultural society studies. *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*, 7(5), 916–922.
- Gurr, T. R. (2004). *Ethnic Conflict in World Politics* (2nd ed.). Westview Press.
- Hannerz, U. (1980). *Exploring the City, Inquiries Toward an Urban Anthropology*. Columbia University Press.
- Hastuti, T, P. (2005). *Kerusuhan Anti Cina Tahun 1980 di Surakarta*. (Skripsi Sarjana, Universitas Sebelas Maret).
- Hefner, R. W. (Ed.). (2001). *The politics of multiculturalism: Pluralism and citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. University of Hawai'i Press (Vol. 105). <http://www.jstor.org/stable/j.ctt6wqpj7>
- Horowitz, D. L., & Kuper, L. (1986). Ethnic Groups in Conflict. In *Contemporary Sociology* (Vol. 15, Issue 4, p. 642). <https://doi.org/10.2307/2069338>
- Koentjaraningrat. (2015). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (cetakan ke). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lumowa, V. (2022). Diskursus multikulturalisme dan wajah Indonesiannya. *Jurnal Filsafat*, 32(2), 311. <https://doi.org/10.22146/jf.66815>
- Masouri, F., & Elias, A. (2025). Pluralitas diversity governance; deepening the multiculturalism-interculturalism nexus. *Comparative Migration Studies*. <https://doi.org/10.1186/s40878-025-00446-y>
- Nelson, A., Revyani, D., & Setyawan, A. (2022). The Effect of Multiculturalism and Cultural Diversity on Innovative Work Behavior with Cultural Intelligence as Mediation. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 9(2), 59–68. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v9i2.2676>
- Nurchayono, O. H. (2018). Pendidikan Multikultural Di Indonesia: Analisis Sinkronis Dan Diakronis. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 105. <https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20404>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Parekh, B. (2001). Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory. *Ethnicities*, 1, 109–105. <https://doi.org/10.1177/146879680100100112>
- Prianto, A. (2008). *Ekonomi Mikro*. Setara Press.
- Purdey, J. (2021). *Anti-Chinese violence in Indonesia, 1996-1999*. The Netherlands: Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004486560>
- Purwanto, B. (2012). Dinamika relasi sosial etnik tionghoa dan pribumi di surakarta. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 14(1), 55–72.
- Sadino, S., & Syahbana, J. A. (2014). Pasar tradisional versus pasar modern di daerah perkotaan (Studi kasus: Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(2), 25. <https://doi.org/10.14710/pwk.v10i2.7651>
- Setiono, B. G. (2003). *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Elkasa.
- Slamet, A. R. (2013). Tata ruang simbolik Kota Surakarta: Kajian historis tentang konsep Catur Gatra Tunggal. *Patrawidya*, 14(3), 205–218.
- Subagyo, P. J. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta.
- Suharto, A., & Abdurakhman. (2020). The Sarekat Islam in Surakarta (1912–1915). In *Proceedings of Inusharts 2019*, (pp. 190–193). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200729.038>
- Suryadinata, L. (2004). *Ethnic relations and nation-building in Southeast Asia: The case of the ethnic Chinese*. Institute of Southeast Asian Studies.

- Shoffa Nada, I., Achadi, Yuni, & Mubin, N. (2025). Mewujudkan Masyarakat Multikultural: Sinergi Dalam Perbedaan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 2(2), 383–390
- Teteki, N. W. (2010). *Potensi Pasar Gede sebagai obyek dan daya tarik wisata budaya dan kuliner di Kota Solo* (Laporan Tugas Akhir, Universitas Sebelas Maret).
- Tutasqiyah, N., Filanda Rohmadi, A., Na, N., Leona Amanta, A., & Pamulang, U. (2023). Dampak Penjajahan Belanda Terhadap Struktur Sosial Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang*, 3, 75–79.
- Urfan, A. A., Aliyah, I., & Yudana, G. (2022). Manifestasi konsep kosmologi Jawa dalam perkembangan pola ruang kawasan pusat pemerintahan Surakarta. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 331. <https://doi.org/10.20961/region.v17i2.35009>
- Wibowo, A. (2014). Struktur sosial etnis tionghoa pada masa kolonial di surakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 70–85.
- Kymlicka, W. (2002). *Contemporary political philosophy: An introduction*. Oxford University Press.